



**KINERJA PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN
 PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 PROPINSI SULAWESI BARAT**

OLEH

DIAN NOFIANTY
 M 111 03 054



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
Tgl. Terima	
Asal Data	Kehutanan
Banyak	1 eksemplar
Harga	Rp
No. Inventar	600
No. Klas	SIK - KH 08

NOF
h.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
 FAKULTAS KEHUTANAN
 UNIVERSITAS HASANUDDIN
 MAKASSAR
 2008**



HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan
Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat

Nama Mahasiswa : Dian Nofianty

Nomor Pokok : M 111 03 054

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi Ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan
pada
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing 1

Ir. Abd. Rasvid Kalu, MS

Tanggal : 30 Mei 2008

Pembimbing 2

Ir. M. Asar Said Mahbub, MP

Tanggal : 30 Mei 2008

Mengetahui,
Ketua Panitia Ujian Sarjana Lengkap
Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan

Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP. 131 570 887

Tanggal Lulus : 13 Mei 2008



ABSTRAK

Dian Nofianty (M 111 03 054) Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Propinsi Sulawesi Barat, Dibawah bimbingan Abd. Rasyid Kalu dan M. Asar Said Mahbub.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman dan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai kinerja program penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman.

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan November - Desember 2007 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Propinsi Sulawesi Barat.

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner dengan metode sensus terhadap penyuluh Kehutanan dan Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat. Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja penyuluh kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman belum sepenuhnya optimal. Dalam penyusunan program, penyuluh turut melibatkan petani ikut

berpartisipasi dengan meminta masukan dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan rencana kedepannya. Sedangkan kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman, yaitu : dana, wilayah kerja penyuluh, serta sarana dan prasarana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kinerja Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat" sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, motivasi, saran atau petunjuk dari berbagai pihak.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Ir. Abdul Rasyid Kalu, MS** sebagai pembimbing pertama dan **Bapak Ir. Asar Said Mahbub, MP** sebagai pembimbing kedua yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan serta meluangkan waktunya selama penulis melakukan penelitian hingga penyusunan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Sc** sebagai penasehat akademik.
3. **Bapak Dr. Ir. Mahammad Restu, MP** selaku dekan Fakultas Kehutanan dan **Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS** sebagai ketua program studi Manajemen Hutan dan sekaligus tim penguji.

4. **Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin Mappangaja, M.Sc dan Bapak Ir. H. A. Mujetahid, MP** selaku tim penguji atas kritik dan sarannya.
5. Segenap Dosen Program Studi Manajemen Hutan dan Program Studi Teknologi Hasil Hutan Fakultas Kehutanan.
6. Pimpinan dan seluruh staf Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Ordanus selaku koordinator penyuluh terima kasih bantuannya selama ini dan penyuluh-penyuluh kehutanan yang ada di Dinas Kehutanan Polman.
8. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
 SahabatQ **Hilmiati Harza IP, S.Hut** *"Thanks for all "*, **Muh.Danial S,Hut** *"Thanks ojeknya yach, 3661 ZA"*, **Mala, Nahda, Irham, Melly, Ewink, Syawal** *" kebersamaan kita begitu berarti "*, **Forester 03** (Wiwi, Edy, Enho, Ephy, Ita, Naning, Nana, Anita Bontong,S.Hut, Amien, Geral, Iswan, Anchu, adho dan semuanya) **Teman-teman PU 13** (2T, Sani, Isna,Tia, Has, Hadi, Ipha, Fika, Tiwi) dan **KKN Malaka Miss U ALL**, **Kak Risbar, I-One, Abox, Kak Hamsi, Fathur, Panji, Kak Anci, Hera, Keluarga besar ASPURA** (Godang, Borju, ancha, Kak Aru, Rijal, Khalik, Ari), **Keluarga besar ASPURI** (Kak Upa, Kak Moni, Kak Ely, Niar, K-14, Khus, Ni2, Arfah, Eka, Nesya, Nanda) indahnyanya kebersamaan dalam mewarnai hidup. Terima kasih yang tak terhingga kepada **MAMA ASPURI** yang telah menjadi bagian penyambung nafasku hidup di perantauan .
9. Terima kasih kepada yang telah menjadi **Inspiratorku** *" sarjana ini adalah bagian dari langkah kita, everything gonna be alright with you LUV u"*

Akhirnya kebahagiaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kupersembahkan kepada **Ayahanda A. Rifai S dan Ibunda Indrawati** serta **adikku Muh. Adnan** atas segala doa, kasih sayang, motivasi dan pengorbanannya serta ketulusannya selama ini.

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah sisi Allah Subhanahuwata'ala.

Makassar, Mei 2008

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Evaluasi dan Kinerja.....	5
B. Penyuluhan Kehutanan.....	6
C. Tugas Pokok Penyuluhan Kehutanan.....	10
D. Perencanaan Program Penyuluhan Kehutanan.....	13
E. Unsur-unsur yang Harus Diperhatikan Dalam Menyusun Program Penyuluhan.....	15
F. Jenis-jenis Program Penyuluhan Kehutanan.....	16
G. Faktor-faktor Suksesnya Penyuluh Kehutanan.....	17
H. Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan.....	19



BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Waktu dan Tempat Penelitian	22
	B. Metode Pengumpulan Data	22
	C. Analisis Data	23
	D. Konsep Operasional	25
BAB IV.	KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
	A. Keadaan Fisik Wilayah	
	1. Letak dan Luas	28
	2. Topografi	29
	3. Iklim	29
	4. Penggunaan Lahan	32
	B. Keadaan Sosial dan Ekonomi	
	1. Penduduk	34
	2. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	36
	3. Pendidikan	37
	4. Aksesibilitas dan Transfortasi	39
BAB V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Karakteristik Penyuluh Responden	
	1. Umur	40
	2. Tingkat Pendidikan	41
	3. Klasifikasi Penyuluh	43
	4. Pengalaman Kerja	44
	5. Tingkat Kebutuhan Hidup.....	45
	6. Pengetahuan Tentang Tugas Pokok Penyuluh	46
	7. Kinerja Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya.....	48
	B. Perencanaan Program Penyuluhan Kehutanan	
	1. Program Penyuluhan	49
	2. Rencana Kerja Penyuluhan	53
	C. Pelaksanaan Program Penyuluhan Kehutanan	
	1. Metode Penyuluhan	54
	2. Sasaran dan Materi Penyuluhan.....	56
	3. Peralatan Penyuluhan.....	56

D. Monitoring dan Evaluasi	57
E. Kendala Penyuluhan	
1. Dana	57
2. Wilayah Kerja Penyuluhan	58
3. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	59
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
1.	Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Polman	29
2.	Klasifikasi iklim di Indonesia menurut Schmidt dan Ferguson	30
3.	Data curah hujan rata-rata bulanan selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Polman (1997-2006).....	31
4.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering, Bulan Lembab selama 10 tahun terakhir Di Kabupaten Polewali Mandar (1997 – 2006)	31
5.	Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering Menurut Wilayah Kecamatan	33
6.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Polman Di Perinci Menurut Kecamatan	35
7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tompobulu, Kabupaten Polman	36
8.	Lapangan Pekerjaan 10 Tahun Keatas yang Bekerja di Polman tahun 2006.....	37
9.	Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Pendidikan SD, SLTP, dan SMU di Kabupaten Polman	38
10.	Klasifikasi Usia atau Umur Responden	41
11.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	42
12.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non-Formal	43
13.	Klasifikasi Penyuluh Kehutanan Menurut Jenjang Jabatan Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman	44
14.	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja sebagai Penyuluh	45
15.	Klasifikasi Tingkat Kebutuhan Hidup Responden	46

16. Klasifikasi Tingkat Pengetahuan Responden Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh	47
17. Klasifikasi Tingkat Kinerja Penyuluh Kehutanan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok di Kabupaten Polman	48
18. Hasil Kajian permasalahan Kegiatan Wilayah Kerja I	51
19. Tujuan Penyuluhan di Wilayah Kerja I (Polewali,Binuang,Anreapi)	52
20. Cara mencapai Tujuan Penyuluhan di Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang,Anreapi)	53
21. Frekuensi Kunjungan Penyuluh kehutanan di Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang, Anreapi)	55
22. Pembagian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian di KabupatenPolman	58
23. Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	59

DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Identitas Responden	64
2.	Karakteristik Internal Responden	67
3.	Tingkat Kebutuhan Hidup	68
4.	Pengetahuan Tentang Tugas Pokok Penyuluh	69
5.	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	70
7.	Kinerja Penyuluhan Dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya	71
8.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan	72
9.	Quisioner	73

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai salah satu ekosistem dari alam, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Ini dikarenakan hutan merupakan sumber kehidupan yang mempunyai berbagai potensi baik potensi alam maupun potensi lahan usaha. Manfaat hutan telah dirasakan masyarakat sejak dahulu, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan. Namun seiring laju pertumbuhan ekonomi dan tekanan penduduk menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mengumpulkan hasil hutan tidak dapat dipertahankan lagi, Sehingga mereka memanfaatkan hutan sebagai lahan usaha. Akibat dari kegiatan masyarakat tersebut menyebabkan areal hutan menjadi terganggu atau terjadi degradasi hutan.

Untuk mengantisipasi degradasi hutan yang semakin tinggi, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya strategis dan sistematis untuk menangani permasalahan di bidang kehutanan, seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pengaturan kembali tata ruang wilayah propinsi, pengamanan kawasan hutan dari kegiatan perambahan, pemberdayaan masyarakat serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan kehutanan secara berkelanjutan.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dilaksanakan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan. Sebagai bagian dari pembangunan kehutanan, penyuluhan kehutanan mendukung terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan peningkatan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi.

Masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan adalah sasaran utama penyuluhan kehutanan. Sasaran penyuluhan kehutanan lainnya antara lain: kalangan perusahaan kehutanan, birokrasi kehutanan dan masyarakat luas pada umumnya yang sebagian besar masih tergolong atau dianggap sebagai penduduk miskin. Menurut data CIFOR (2004), penduduk yang tinggal di dalam kawasan hutan negara sekitar 48,8 juta orang, dan 10,2 juta di antaranya dianggap miskin. Jumlah ini belum termasuk penduduk yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan. Keadaan ini bukanlah sesuatu yang menggembirakan dan hal ini telah lama disadari oleh banyak pihak, termasuk para penyuluh kehutanan.

Penyuluh kehutanan sebagai aktor yang dalam kinerjanya banyak bersentuhan secara langsung dengan masyarakat sekitar hutan, diandalkan oleh banyak pihak untuk menjadi salah satu ujung tombak dalam pemecahan masalah-masalah pemanfaatan hutan. Penyuluhan bukan sekedar proses transfer teknologi yang hanya merubah aspek kognitif sasaran, melainkan proses untuk merubah

perilaku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) sasaran, agar dapat membantu dirinya sendiri (mandiri) dalam mengidentifikasi potensi yang dimilikinya dan permasalahan yang dihadapinya sehingga akhirnya dapat menemukan sendiri pemecahan masalahnya.

Peran utama yang dituntut dari seorang penyuluh kehutanan (diantara peran-peran penting lainnya) adalah sebagai agen perubahan (change agent), agen yang mengantarkan sasaran (selanjutnya disebut klien) untuk berubah dari tidak mandiri menjadi mandiri, dari kurang berdaya menjadi lebih berdaya, sehingga nantinya diharapkan akan terjadi perubahan kondisi masyarakat sekitar hutan dari tidak sejahtera menjadi lebih sejahtera. Beberapa tahapan proses perlu dilalui seorang penyuluh kehutanan untuk berhasil melakukan perubahan pada kliennya. Tahapan-tahapan yang dilalui penyuluh kehutanan adalah perencanaan program, monitoring kegiatan hingga evaluasi penyuluhan kehutanan.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) telah membuat beberapa kebijakan yang mengatur masalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang ada di Kabupaten Polman. Salah satu kebijakan itu adalah dilakukannya program penyuluhan kehutanan. Namun hingga saat ini dalam pelaksanaannya, ada beberapa program yang tidak terealisasi yang mungkin diakibatkan oleh beberapa kendala. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan kehutanan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Propinsi Sulawesi Barat.

B. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman.

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi mengenai kinerja program penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Evaluasi dan Kinerja

Evaluasi dipandang sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif mencapai hasil akhir yang telah direncanakan sebelumnya kemudian menjadi bahan perencanaan atau revisi pekerjaan. Evaluasi sebagai salah satu fungsi manajemen, dan administrasi yang telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Salah satu yang mempertahankan konsep evaluasi sebagai fungsi manajemen, Sedangkan Siagian (1983) mengemukakan bahwa evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan suatu program maka kegiatan menyangkut proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Pendapat ini dikemukakan oleh Dharma (1991) kinerja adalah suatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau kelompok orang. Sedangkan Definisi kinerja yang dikemukakan oleh Ananto Yudono dan Rahmat dalam buku perencanaan peningkatan kerja (1999) adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode tertentu.

Pengertian kinerja dikemukakan pula oleh Hasibuan (1994) adalah sebagai berikut:

“ Prestasi kerja atau kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu.

Kinerja adalah gabungan dari ketiga faktor yaitu kemampuan dan minat seorang pegawai. Kemampuan dari penerimaan atas penjelasan delegasi tugas dan peran serta tingkat motivasi seseorang pegawai.

Penilaian terhadap kinerja dimaksudkan untuk mengukur tingkat kinerja organisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Penilaian bertujuan agar sedini mungkin mencari solusinya.

B. Penyuluh Kehutanan

Van Den Ban dan Hawkins (1999), menyatakan bahwa penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga biasa membuat keputusan yang benar. Departemen Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan Materi Kehutanan Nomor. SK.132/Menhut-II/2004 mengartikan bahwa penyuluh kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan, oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan (Departemen Kehutanan, 2004).

Ridwan (2005), menguraikan Penyuluhan kehutanan adalah proses perubahan perilaku masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah mengarah kepada pemahaman tentang manfaat pembangunan kehutanan agar terdorong untuk berperan aktif dan berdaya dalam posisinya sebagai pelaku. Sedangkan Mardikanto (1993) mengemukakan bahwa penyuluhan kehutanan merupakan upaya untuk mengubah perilaku masyarakat yang mencakup pengetahuan, sikap, keterampilan melalui proses pendidikan.

Bagi kehidupan manusia, Penyuluhan kehutanan adalah transformasi teknologi dan penyampaian kebijakan serta informasi kehutanan pada kelompok masyarakat sasaran melalui pendidikan non-formal untuk mengubah perilaku agar tahu, mau dan mampu menerapkan teknologi itu bagi pendidikan hidupnya serta secara sadar ikut aktif dalam pelestarian hutan dan sumber daya alam lainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mulyana, (1999).

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta perubahan sikap mental masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan dan sadar akan pentingnya sumber daya hutan. Mengingat sangat luasnya tugas pokok para penyuluh kehutanan tersebut, maka pemerintah melalui keputusan tersebut membaginya dalam dua kelompok jabatan fungsional, yakni penyuluh kehutanan terampil dan Penyuluh Kehutanan ahli. Spesifikasi kedua jenis jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan tersebut adalah :

1. Penyuluh Kehutanan Terampil. Persyaratan minimal PNS yang menduduki jabatan ini adalah memiliki latar belakang Diploma tiga (D3) bidang Kehutanan, peternakan, perikanan, pertanian dengan pangkat serendah-rendahnya II/b. Jabatan fungsional Penyuluh Kehutanan terampil terdiri atas tiga tingkatan, yaitu:
 - a. Penyuluh Kehutanan Pelaksana (pangkat, golongan/ruang pengatur Muda Tingkat 1, II/b sampai Pengatur Tingkat I/II/d).

- b. Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan (pangkat, golongan/ruang : PenataMuda, III/a sampai Penata Muda Tingkat I/III/b).
 - c. Penyuluh Kehutanan Penyelia (pangkat, golongan/ruang: Penata, III/c).
2. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli. Jabatan fungsional ini dikhususkan pada sarjana dan atau pascasarjana, minimal berijazah sarjana/diploma IV bidang Kehutanan, Pertanian, peternakan atau perikanan dan pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a. Pada jabatan fungsional ini terdapat empat klasifikasi secara berjenjang, yakni :
- a. Penyuluh Kehutanan Pertama (Penata Muda, III/a sampai Penata Muda Tingkat III/b).
 - b. Penyuluh Kehutanan Muda (Penata, III/c sampai Penata Tingkat I, III/d)
 - c. Penyuluh Kehutanan Madya (Pembina, IV/a sampai Pembina Utama Muda IV/c).
 - d. Penyuluh Kehutanan Utama (Pembina Utama Madya, IV/d sampai Pembina Utama IV/e).

Meskipun terdapat perbedaan antara kedua jenis jabatan tersebut namun tidak ada hubungan hirarkis antara Penyuluh Kehutanan Terampil dengan Penyuluh Kehutanan ahli. Tetapi dalam operasional kegiatan, keduanya mempunyai hubungan kerja yang saling mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menjadi satu kesatuan yang utuh. Penyuluh Kehutanan Terampil merupakan petugas terdepan di lapangan dan berhak memperoleh petunjuk, bimbingan dan supervisi dari penyuluh Kehutanan ahli. Demikian pula Penyuluh kehutanan ahli, berkewajiban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan dan

teknologi kehutanan dalam pertemuan dua mingguan (sesuai jadwal dan rencana kerja). Bekal yang diberikan menyangkut spesialisasi ataupun keahlian disiplin ilmunya (Soeroso, 1999).

Departemen Kehutanan (2000) menyebutkan bahwa untuk menjadi penyuluh kehutanan yang memiliki kinerja bagus yang berarti menuju pada profesional, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh penyuluh, yaitu:

1. Sifat dan perasaan organisasi penyuluh
2. Pengertian dan pengetahuan tentang teknologi yang berkaitan dengan materi penyuluhan yang diprogram
3. Kemampuan untuk menjelaskan program yang disampaikan
4. Kemampuan untuk mengorganisasikan masyarakat dan sumberdaya yang tersedia
5. Keterampilan untuk melihat/menelaah hubungan antara prinsip-prinsip kegiatan penyuluhan dengan kenyataan yang dihadapi dalam praktek dan mampu menentukan pilihan penyesuaiannya.
6. Keterampilan meneliti, terutama dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menentukan titik-titik pusat masalah, mengidentifikasi alternatif pemecahan masalah yang paling sesuai.
7. Kemampuan membangun hubungan kemanusiaan, terutama dengan para pemimpin lokal untuk menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kelompok.

C. Tugas Pokok Penyuluh Kehutanan

Tugas pokok penyuluh kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan (Departemen Kehutanan, 2003). Adapun rincian butir kegiatannya antara lain :

1. Mengumpulkan data sekunder dan informasi wilayah kerja
2. Mengolah data potensi wilayah serta kebutuhan teknologi kehutanan tingkat desa dan kecamatan
3. Memandu menyusun rencana tahunan usaha wanatani kelompok sasaran
4. Melaksanakan kajian identifikasi kebutuhan penyuluh kehutanan
5. Menyusun rencana kerja tahunan penyuluh kehutanan
6. Memandu penyusunan rencana definitif kelompok (KDK) dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kelompok wanatani
7. Mengumpulkan data dalam rangka persiapan penyusunan materi penyuluhan kehutanan
8. Menyusun/membuat materi penyuluhan kegiatan dalam bentuk photo
9. Menyusun/membuat materi penyuluh kehutanan dalam bentuk flipchart
10. Menyusun/membuat materi penyuluh kehutanan dalam bentuk chart/gambar
11. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada anggota kelompok
12. Melakukan kunjungan tatap muka/anjingsana kepada kelompok sasaran
13. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada perorangan
14. Memberikan konsultasi/pemecahan masalah kepada kelompok sasaran lain

15. Mendorong pembentukan organisasi kelompok sasaran/menumbuhkan kelompok sasaran.
16. Meningkatkan kemampuan kelompok sasaran dari pemula sampai lanjut
17. Melakukan kegiatan demonstrasi cara (percontohan)
18. Melakukan kegiatan demonstrasi hasil percontohan petak (demonstrasi plot)
19. Melaksanakan temu lapangan
20. Melakukan temu wicara/sarasehan kelompok sasaran tingkat BPP/Kecamatan
21. Melakukan temu karya kepada kelompok tani binaan
22. Melaksanakan kegiatan widya karya-karya wisata kepada kelompok tani binaan
23. Melaksanakan kegiatan widya karya (perjalanan praktek studi banding sebagai instruktur/pembimbing) tingkat desa dan kecamatan
24. Melaksanakan penyuluhan pada pertemuan secara masal/kampanye dalam bentuk ceramah umum tingkat desa dan kecamatan
25. Menyusun laporan bulanan
26. Mengumpulkan data primer dan informasi wilayah kerja
27. Penyusunan laporan tahunan
28. Merekapitulasi rencana usaha tani wanatani wilayah serta kebutuhan teknologi kehutanan
29. Menyusun monografi wilayah kerja penyuluhan
30. Menyusun/membuat peta tematik tentang kondisi dan potensi wilayah serta kebutuhan teknologi kehutanan
31. Merumuskan kebutuhan teknologi kehutanan

32. Merumuskan hasil identifikasi kebutuhan penyuluhan kehutanan
33. Sebagai penyajian dalam mendiskusikan konsep program penyuluhan kehutanan
34. Mengolah data materi penyuluhan
35. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk selebaran/pamflet
36. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk *leaflet/folder*
37. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk brosur/*booklet*
38. Menyusun /membuat materi penyuluhan kehutanan berupa realita dalam bentuk maket
39. Menyusun/membuat materi penyuluhan kehutanan dalam bentuk spesimen
40. Melaksanakan kajian terap teknologi anjuran /uji coba
41. Sebagai pramuwicara dalam kegiatan pameran kehutanan tingkat Kabupaten/Kota
42. Memberi bimbingan kepada sekolah lapang
43. Sebagai moderator dalam temu antara wilayah/teknis
44. Sebagai nara sumber dalam temu teknik wilayah
45. Melakukan temu usaha
46. Melakukan pemantauan/pengendalian pelaksanaan penyuluhan kehutanan
47. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan penyuluhan kehutanan

D. Perencanaan Program Penyuluhan Kehutanan

Perencanaan program Penyuluhan Kehutanan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kejadian-kejadian yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2000).

Menurut Syamsuddin (1987), pentingnya perencanaan program Penyuluhan Kehutanan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaannya.
2. Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat (umum).
3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap adanya usul/saran penyempurnaan yang baru.
4. Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai yang perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.
5. Memberikan pengertian yang jelas terhadap pemilihan tentang pentingnya dari masalah-masalah insidental (yang dinilai akan menuntut perlunya revisi program) dan pemantapan dari perubahan-perubahan sementara (jika memang diperlukan revisi terhadap program).
6. Mencegah kesalahartian tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan, maupun yang tidak dirasakan.
7. Memberikan kelangsungan dalam diri personal, selama proses perubahan berlangsung. Artinya setiap personal yang terlibat dalam pelaksanaan dan

evaluasi program selalu merasakan perlunya kontinuitas program sampai tercapainya tujuan yang diharapkan.

8. Membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang dikehendaki.
9. Menghindari pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya dan waktu) dan merangsang efisiensi pada umumnya.
10. Menjamin kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat.

Menurut Mardikanto (1993), secara umum pokok-pokok pikiran yang harus ada dalam perencanaan program Penyuluhan Kehutanan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program Penyuluhan Kehutanan, merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Artinya, perencanaan program Penyuluhan Kehutanan merupakan suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang tidak pernah berhenti sampai tercapainya tujuan (kebutuhan, keinginan dan minat) yang dikehendaki.
2. Perencanaan program Penyuluhan Kehutanan, dirumuskan oleh banyak pihak. Artinya dirumuskan secara bersama-sama oleh Penyuluh Kehutanan dan masyarakat sasarnya dengan upaya-upaya pembangunan masyarakat setempat.

3. Perencanaan program Penyuluhan Kehutanan dirumuskan berdasarkan fakta (bukan dugaan) dan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia yang mungkin dapat digunakan.
4. Perencanaan program, meliputi perumusan tentang : keadaan, masalah, tujuan dan cara (kegiatan) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu.
5. Perencanaan program Penyuluhan Kehutanan, dinyatakan secara tertulis. Artinya, perencanaan program merupakan pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, cara mencapai tujuan dan rencana evaluasi atas hasil pelaksanaan program yang telah dirumuskan.

E. Unsur-unsur Yang Harus diPerhatikan Dalam Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan

Menurut Syamsuddin (1987), untuk menyusun suatu program Penyuluhan Kehutanan ada beberapa hal yang harus diperhatikan tetapi secara umum hal-hal yang terpenting adalah :

1. *Keadaan*. Fakta yang ditunjukkan oleh data pada saat penyusunan program, data di sini meliputi data actual (data yang nyata pada saat itu) dan data potensial (data keadaan yang mungkin dicapai).
2. *Masalah*. Faktor-faktor penyebab keadaan yang tidak memuaskan atau belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Masalah terjadi akibat adanya perbedaan antara data aktual dengan data potensial. Dalam Penyuluhan Kehutanan dibedakan antara masalah umum dan masalah khusus. Masalah umum merupakan dasar untuk merumuskan tujuan program dan masalah khusus atau masalah spesifik dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan kegiatan.



3. *Tujuan*. Merupakan suatu pernyataan pemecahan masalah atau pernyataan yang ingin dicapai. Untuk kepentingan Penyuluhan Kehutanan ada dua macam tujuan, yaitu program dan tujuan kegiatan. Tujuan program adalah pernyataan pemecahan masalah khusus, atau tujuan dari setiap kegiatan Penyuluhan Kehutanan.
4. *Cara Mencapai Tujuan*. suatu rencana kegiatan yang didalamnya menyangkut masalah khusus, tujuan kegiatan, metode, lokasi, unit, volume, frekuensi, sasaran, pelaksanaan, waktu, perlengkapan dan pembiayaan. Dengan kata lain cara mencapai tujuan ini dituangkan secara terinci dalam rencana kegiatan

F. Jenis-jenis Program Penyuluhan Kehutanan

Menurut Mardikanto (1993), berdasarkan proses pembuatannya, program Penyuluhan Kehutanan dibedakan atas 5 macam yaitu :

1. *Pre-determined Program*. Adalah program Penyuluhan Kehutanan yang sifatnya masih umum dan merupakan sumber atau dasar penyusunan program di tingkat bawah.
2. *Self-determined Program*. Program yang dibuat oleh petani atau kelompok tani hutan sesuai dengan usaha tani hutan yang dikerjakannya.
3. *Joint-determined Program*. Program yang dibuat bersama antara Penyuluh Kehutanan dengan petani. Program ini dapat dibuat di tingkat wilayah kerja Penyuluhan Kehutanan.

4. *Fact determined Program*. Yaitu program yang dibuat secara khusus untuk membuat joint program.
5. *Specialist-determined Program*. Yaitu program yang dibuat secara khusus untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu.

G. Faktor-Faktor Suksesnya Penyuluh Kehutanan

Menurut Gubri (2005), terdapat beberapa hal yang berhubungan dengan kesuksesan seorang penyuluh kehutanan, antara lain adalah :

1. Tingkat Usaha dari Penyuluh Kehutanan

Suksesnya penyuluh kehutanan dalam mengamankan adopsi inovasi kliennya berhubungan dengan tingkat usahanya di dalam melakukan kontak dengan klien. Semakin banyak kontak dilakukan umumnya semakin tinggi tingkat keberhasilannya

2. Orientasi Klien

Keberhasilan penyuluh kehutanan dalam mengamankan proses adopsi inovasi berhubungan dengan sejauh mana ia berorientasi kepada klien daripada kepada lembaga perubahan.

3. Kesesuaian dengan Kebutuhan Klien

Keberhasilan penyuluh kehutanan juga berhubungan dengan derajat tingkat kesesuaian program difusi dengan kebutuhan klien. Semakin sesuai dengan kebutuhan klien, maka peluang keberhasilan akan semakin tinggi.

4. Empati Penyuluh Kehutanan

Empati adalah derajat sejauh mana seseorang dapat menempatkan dirinya ke dalam peran orang lain.

5. Kontak Penyuluh dengan Kalangan Bawah (lower-status)

Klien dari kalangan bawah secara ekonomi berbeda dari penyuluh kehutanan, kondisi ini menghalangi efektivitas komunikasi. Apa yang bisa dilakukan untuk mendorong lower status dan least inovatif clients agar memiliki kontak yang lebih banyak dengan penyuluh? Salah satu jawabannya adalah dengan memilih penyuluh yang semirip mungkin dengan kliennya.

6. Kredibilitas Penyuluh

Kredibilitas dapat dibagi menjadi dua, yaitu kredibilitas kompetensi dan kredibilitas keamanan. Kredibilitas kompetensi adalah derajat sejauh mana suatu sumber komunikasi atau saluran komunikasi dipandang memiliki pengetahuan dan tingkat keahlian yang tinggi. Kredibilitas keamanan adalah derajat sejauh mana suatu sumber atau saluran komunikasi dipandang aman untuk dapat dipercaya.

7. Pemuka Masyarakat

Keberhasilan seorang penyuluh dalam mengamankan adopsi inovasi oleh kliennya berhubungan dengan sejauh mana ia dapat bekerja sama dengan para pemuka masyarakat.

H. Tahapan Penyusunan Program Penyuluhan Kehutanan

Menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan (2000), tahapan penyusunan program Penyuluhan Kehutanan dibagi atas beberapa langkah yaitu:

1. Tujuan, Kebijaksanaan dan Prosedur.

Jika secara administratif, kegiatan Penyuluhan Kehutanan telah ditetapkan pada suatu daerah, maka harus dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Tetapan wilayah kerja Penyuluhan Kehutanan
- b) Tentukan tujuan yang ingin dicapai
- c) Aturlah agar setiap petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan di dalam suatu organisasi dapat mengetahuinya.
- d) Jelaskan kebijaksanaan yang ditempuh oleh organisasi yang akan melaksanakan Penyuluhan Kehutanan.
- e) Susun bagan sistem dan prosedur yang harus diikuti oleh para staff

2. Pengumpulan Informasi yang Melatarbelakangi Program Penyuluhan Kehutanan

Pengumpulan Informasi yang melatar belakangi program Penyuluhan Kehutanan yang akan dilaksanakan melalui pertemuan umum, kunjungan kepada tokoh-tokoh masyarakat, suvey, membagikan daftar pertanyaan atau diskusi dengan kelompok-kelompok tani hutan dan tokoh masyarakat yang memiliki posisi penting di mata masyarakat.

3. Pemilihan Panitia Perencana dan Diskusikan Rencana Kerja

Jika pada suatu daerah sudah ada organisasi penyuluhan, maka dapat dipergunakan organisasi rencana Penyuluhan Kehutanan yang telah ada, tetapi pada suatu organisasi baru, maka petama-tama harus diputuskan terlebih dahulu

apakah dalam menyusun program penyuluhan akan bekerja dengan bentuk kelompok, maka anggota-anggota yang terpilih selanjutnya berkumpul untuk mendiskusikan informasi yang menjadi latar belakang program Penyuluhan Kehutanan, guna mengembangkan suatu rencana kerja dengan memanfaatkan saran-saran mereka.

4. Konsultasi dengan Para Ahli dan Kumpulkan Informasi Hasil Penelitian

Untuk menjamin agar prosedur teknis yang akan dilaksanakan sudah benar, maka informasi yang melatarbelakangi program penyuluhan perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan para ahli atau para peneliti. Di samping itu diskusi ini juga dipandang penting untuk mengetahui apakah tersedia informasi di masing-masing lembaga tersebut di atas yang dapat dimanfaatkan, sebelum menyusun program Penyuluhan Kehutanan.

5. Menyusun Rencana Kerja

Rencana kerja ini harus dibuat oleh petugas yang akan melaksanakan penyusunan program Penyuluhan Kehutanan. Rencana kerja tersebut haruslah mencakup informasi yang melatarbelakangi penyusunan program penyuluhan.

6. Persetujuan dan Revisi.

Diskusi program kerja yang telah disusun oleh Penyuluh Kehutanan dengan penduduk setempat dan dapatkan persetujuan dari mereka. Demikian juga persetujuan dari pejabat setempat. Jika program kerja Penyuluhan Kehutanan tersebut kurang memenuhi keinginan dan kurang memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar hutan, dapat disempurnakan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

7 Pelibatan Orang Lain

Untuk memperkenalkan program kerja Penyuluhan Kehutanan kepada masyarakat setempat, sebarkan program kerja penyuluhan yang telah disusun oleh para Penyuluh Kehutanan dan libatkan setiap orang serta berikan tanggung jawab tertentu kepadanya. Dalam melibatkan orang ini, hendaknya diupayakan agar mereka merasa ikut berperan serta didalam penyusunan program penyuluhan, walaupun mereka sebenarnya tidak terlibat secara langsung dalam penyusunan program penyuluhan.

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan selama bulan November - Desember 2007 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) Propinsi Sulawesi Barat.

B. Metode Pengumpulan Data

Data dan informasi yang dikumpulkan terbagi atas dua jenis data yaitu

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur yang dilakukan dengan menggunakan kuisisioner dengan metode sensus terhadap penyuluh kehutanan yang ada pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman dengan daftar kuesioner meliputi : Identitas penyuluh, tingkat pendidikan penyuluh, Kinerja pelaksanaan tugas pokok penyuluh, sarana penyuluhan, serta kendala-kendala yang dihadapi penyuluh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga/instansi, buku-buku dan laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan melihat sejauh mana kinerja pelaksanaan penyuluhan kehutanan. Data tersebut terdiri dari karakteristik penyuluh responden, karakteristik eksternal responden, kinerja penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan yang mencakup program, sasaran, materi penyuluhan, kendala, monitoring dan evaluasi.

Menurut Damdahnu (2005), umur, pendidikan formal dan non formal, pengalaman kerja, tingkat kebutuhan hidup, pengetahuan tentang tugas pokok penyuluh, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana, dan kinerja penyuluh dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Umur

Kategori umur yang digunakan adalah :

- 1). Umur produktif 15 – 49 tahun
- 2). Umur kurang produktif 50 – 65 tahun
- 3). Umur tidak produktif > 65 tahun

2. Pendidikan Formal

- 1). Rendah : SD
- 2). Sedang : SMA
- 3). Tinggi : Perguruan tinggi



3. Pendidikan Non-Formal

- 1). Rendah (tidak pernah kursus/pelatihan)
- 2). Sedang (pernah 1-2 kali)
- 3). Tinggi (sering > 2kali)

4. Pengalaman Kerja

- 1). Pengalaman baru (≤ 10 tahun)
- 2). Pengalaman sedang (10 – 20 tahun)
- 3). Pengalaman lama (> 20 tahun).

5. Tingkat Kebutuhan Hidup

- 1). Sangat tidak memuaskan (skor < 25)
- 2). Tidak memuaskan (skor 26 – 37)
- 3). Kurang memuaskan (skor 38 – 49)
- 4). Memuaskan (skor 50 – 61)
- 5). Sangat memuaskan (skor > 62)

6. Pengetahuan Tentang Tugas Pokok Penyuluh

- 1). Sangat rendah (skor ≤ 84)
- 2). Rendah (skor 85 – 122)
- 3). Sedang (skor 123 – 160)
- 4). Tinggi (skor 161 – 198)
- 5). Sangat tinggi (skor ≥ 199)

7. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

- 1). Sangat rendah (skor ≤ 27)
- 2). Rendah (skor 28 – 40)

- 3). Sedang (skor 41 – 53)
- 4). Tinggi (skor 54 – 66)
- 5). Sangat tinggi (skor \geq 67)

8. Kinerja Penyuluh Dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya

- 1). Sangat rendah (skor \leq 84)
- 2). Rendah (skor 85 – 122)
- 3). Sedang (skor 123 – 160)
- 4). Tinggi (skor 161 – 198)
- 5). Sangat tinggi (skor \geq 199)

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan operasional dari berbagai istilah yang berhubungan dengan penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut, maka berikut ini ada batasan pengertian dari beberapa istilah :

- 1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
- 2) Kehutanan adalah ilmu, seni, profesi serta praktek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di atas dan yang berhubungan dengan lahan-lahan hutan agar dapat bermanfaat bagi manusia kini dan manusia yang akan datang.

- 3) Kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas dasar kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu
- 4) Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraan.
- 5) Penyuluhan Kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan dan sikap perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau, mampu melakukan usaha di bidang kehutanan untuk meningkatkan pendapat dan kesejahteraan serta mempunyai kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
- 6) Penyuluh kehutanan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan secara penuh di wilayah kerjanya, oleh pejabat yang berwenang.
- 7) Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan suatu program dalam proses pencapaian tujuan yang berguna untuk memberikan umpan balik bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas kinerjanya.
- 8) Programa penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis dan teratur.
- 9) Rencana kerja adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seorang penyuluh demi tercapainya tujuan programa yang efektif dan efisien.

- 10) Umur adalah usia responden terhitung sejak mulai lahir sampai penelitian ini dilaksanakan, diukur dalam tahun.
- 11) Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan formal tertinggi yang dilalui oleh responden yang dinyatakan berdasarkan ijazah terakhir yang dimilikinya (SMU/Sederajat, Diploma, Sarjana).
- 12) Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang penyuluh.
- 13) Pendidikan non-formal adalah kursus/pelatihan yang pernah diikuti seorang penyuluh.
- 14) Golongan kepangkatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat pegawai negeri sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian, dinyatakan dalam pangkat/golongan terakhir.
- 15) Pengalaman kerja adalah lamanya seorang penyuluh bekerja sejak diangkat menjadi penyuluh kehutanan sampai penelitian ini dilaksanakan yang dinyatakan dalam tahun.
- 16) Tingkat kebutuhan hidup adalah berbagai bentuk kebutuhan hidup yang dapat menimbulkan motivasi bekerja dilihat dari prioritas kebutuhan hidup yang dirasakan saat ini.
- 17) Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana adalah fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan suatu kegiatan penyuluhan serta kesesuaian antara jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan penyuluh.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Wilayah

1. Letak dan Luas

Kabupaten Polewali Mandar (Polman) merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Polman terletak antara 2°40'00" - 3°32'00" Lintang Selatan dan 118°40'27" - 119°32'27" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a Sebelah Utara : Kabupaten Mamasa
- b Sebelah Selatan : Selat Makassar
- c Sebelah Barat : Kabupaten Majene
- d Sebelah Timur : Kabupaten Pinrang

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Polman terdiri dari 15 Kecamatan, 132 desa/kelurahan, dengan total luas wilayah 2.022,30 km². Kecamatan Campalagian, Wonomulyo, dan Mapilli merupakan wilayah administrasi pemerintahan kecamatan yang memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak, meliputi 14 desa/kelurahan. Kecamatan yang tidak memiliki wilayah administrasi kelurahan adalah kecamatan Polewali.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Polman

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kelurahan	Desa
1	Tinambung	21,3	1	7
2	Balanipa	37,4	1	9
3	Limboro	47,6	1	9
4	Tubbi taramanu	357,0	1	5
5	Allu	228,3	1	5
6	Campalagian	87,8	1	13
7	Luyo	156,6	1	8
8	Wonomulyo	72,8	2	12
9	Mapilli	320,9	1	13
10	Tapango	125,8	1	9
11	Matakali	57,6	1	5
12	Polewali	26,3	9	0
13	Binuang	123,3	3	4
14	Anreapia	124,6	1	4
15	Matangnga	234,9	1	3
Jumlah		2.022,3	26	106

Sumber : Kabupaten Polman Dalam Angka, 2007.

1. Topografi

Keadaan topografi atau bentang lahan terdiri dari datar, landai, bergelombang, berbukit, dan bergunung yang terletak pada ketinggian 200 – 400 m dari permukaan laut.

2. Iklim

Umumnya penentuan tipe iklim yang digunakan di Indonesia didasarkan pada klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson dengan membandingkan rata-rata jumlah bulan kering, bulan lembab dan bulan basah dalam kurun waktu 10 tahun yang berawal dari tahun pertama dan kesepuluh tahun terakhir.

Tipe iklim yang terdapat pada Kabupaten Polman dapat ditentukan nilai Q

ratio dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Q_{ratio} = \frac{\text{Rata-rata Bulan Kering}}{\text{Rata-rata Bulan Basah}} \times 100\%$$

Selanjutnya Mohr membagi 3 bulan berdasarkan parameter derajat kebasahan dan kekeringan setiap bulannya yaitu :

- a. Bulan basah (Bb) jika curah hujan setiap bulannya > 100 mm
- b. Bulan Lembab (Bl) jika curah hujan setiap bulannya antara 60 mm – 100 mm
- c. Bulan kering (Bk) jika curah hujan setiap bulannya < 60 mm

Tabel 2. Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmidt dan Ferguson

Kondisi Iklim	Tipe Iklim	Nilai Q (%)
Sangat Basah	A	0 – 14,3
Basah	B	14,3 – 33,3
Agak Basah	C	33,3 – 60
Sedang	D	60 – 100
Agak Kering	E	100 – 160
Kering	F	160 – 300
Sangat Kering	G	300 – 700
Luar Biasa Kering	H	> 700

Data curah hujan rata-rata dari stasiun Klimatologi I Kabupaten Polman selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 sampai tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama 10 Tahun Terakhir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) (1997-2006)

Bulan	Tahun										Rata-rata
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
Jan	178	202	191	23	588	194	224	543	38	80	233
Febr	153	112	141	35	44	387	109	52	152	107	130
Maret	126	158	63	49	191	129	84	333	267	126	153
April	218	58	156	170	55	64	127	551	181	202	178
Mei	42	109	68	219	117	66	88	251	0	71	103
Juni	63	110	27	109	42	87	33	434	24	48	98
Juli	15	41	54	269	91	40	16	0	0	0	53
Agst	0	73	0	109	82	36	23	0	0	0	32
Sept	53	128	0	93	76	18	180	42	65	23	68
Okt	169	317	0	225	204	84	105	0	13	27	115
Nov	173	355	36	72	93	117	341	243	116	69	162
Des	152	261	194	153	298	306	158	117	0	119	182
Total	1.342	1.994	930	1.526	1.881	1.528	1.486	2.626	856	872	1.504

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Polman, 2007

Nilai rata-rata bulan kering, bulan basah dan bulan lembab selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering, Bulan Lembab selama 10 Tahun Terakhir di Kabupaten Polowali Mandar (1997 – 2006).

Tahun	Jumlah Bulan Basah	Jumlah Bulan Kering	Jumlah Bulan Lembab
1997	7	3	1
1998	9	2	1
1999	4	3	2
2000	7	3	2
2001	5	3	4
2002	5	3	4
2003	7	3	2
2004	7	2	-
2005	4	3	1
2006	4	3	3
Jumlah	59	28	20
Rata-rata	5,9	2,8	2

Sumber : Stasiun Klimatologi Kabupaten Polman, 2007

Selama Kurun Waktu sepuluh tahun terakhir jumlah bulan basah 59 dengan rata-rata 5,9 bulan kering 28 dengan rata-rata 2,8 dan bulan lembab sebanyak 20 dengan rata-rata 2 sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Kabupaten Polewali Mandar yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{\text{Rata-rata Bulan Kering}}{\text{Rata-rata Bulan Basah}} \times 100 \% \\
 &= \frac{2,8}{5,9} \times 100 \% \\
 &= 47,45 \%
 \end{aligned}$$

Makin kecil harga Q maka makin basah suatu tempat dan makin besar harga Q ratio maka makin kering suatu tempat. Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Kabupaten Polewali Mandar termasuk dalam tipe iklim C yaitu iklim agak basah yang nilai Q ratio berkisar antara 33,3 % – 60 %.

4. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Polman menurut intensitas kebutuhan penggunaan air dibagi menurut penggunaan lahan sawah dan lahan kering. Luas Sawah di Kabupaten Polman mencapai 15.768 ha atau 7,8 % luas wilayah kabupaten sedangkan luas lahan kering mendominasi luas lahan di Kabupaten Polman yang mencapai 186.482 ha atau setara dengan 92,2 % luas wilayah Kabupaten Polman.

Berdasarkan wilayah administrasi kecamatan, terdapat variasi luas penggunaan lahan untuk lahan sawah dan lahan kering di Kabupaten Polman. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi biofisik lahan dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan wonomulyo merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan sawah yang mencapai 2.995 ha atau 19,0 % dari total luas lahan sawah yang terdapat di Kabupaten Polman. Sedangkan kecamatan yang tidak memiliki areal sawah adalah Kecamatan Balanipa dan Allu. Penggunaan lahan kering terluas terdapat di Kecamatan Tubbi Tarammanu mencapai 35.145 ha atau setara dengan 18,8 % luas wilayah lahan kering di Kabupaten Polman. Sedangkan kecamatan yang memiliki lahan kering terkecil adalah Kecamatan Polewali seluas 1.706 ha (0,9 %) luas lahan kering di Kabupaten Polman.

Tabel 5. Luas Lahan Sawah dan Lahan Kering Menurut Wilayah Kecamatan

No	Kecamatan	Lahan Sawah (ha)	Lahan Kering (ha)	Jumlah
1	Tinambung	335	1.799	2.134
2	Balanipa	-	3.742	3.742
3	Limboro	63	4.692	4.755
4	Tubbi taramanu	600	35.145	35.745
5	Allu	-	22.830	22.830
6	Campalagian	2.075	6.709	8.784
7	Luyo	2.020	13.640	15.660
8	Wonomulyo	2.995	4.287	7.282
9	Mapilli	2.332	29.718	32.040
10	Tapango	1.259	11.322	12.581
11	Matakali	1.786	3.976	5.762
12	Polewali	921	1.706	2.627
13	Binuang	1.046	11.288	12.334
14	Anreapi	241	12.221	12.462
15	Matangnga	105	23.387	23.492
	Jumlah	15.768	186.462	202.230

Sumber : Kabupaten Polman Dalam Angka, 2007

B. Keadaan Sosial Ekonomi

1. Penduduk

Kabupaten Polman memiliki jumlah penduduk 367, 761 jiwa di akhir tahun 2006, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 182 jiwa/km². Kepadatan penduduk tersebut bervariasi menurut kondisi masing-masing wilayah kecamatan. Kepadatan Penduduk pada suatu wilayah merupakan salah satu indikator perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Hal tersebut dapat terlihat pada kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terpadat adalah Kecamatan Polewali sebesar 47.729 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.817 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Tinambung mencapai 20.833 jiwa dengan kepadatan penduduk 976 jiwa/km². Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Matangnga mencapai 4.859 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk 21 jiwa/km², disusul oleh Kecamatan Tubbi tarammanu dengan tingkat kepadatan 45 jiwa/km². Uraian tentang jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Polman diperinci menurut Kecamatan disajikan pada Tabel 6.



Table 6. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Polman Diperinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1	Tinambung	21,3	20.833	976
2	Balanipa	37,4	24.015	642
3	Limboro	47,6	17.560	369
4	Tubbi taramanu	357,0	15.984	45
5	Allu	228,3	12.368	54
6	Campalagian	87,8	50.411	574
7	Luyo	156,6	24.286	155
8	Wonomulyo	72,8	41.855	575
9	Mapilli	320,9	31.862	99
10	Tapango	125,8	20.401	162
11	Matakali	57,6	19.759	343
12	Polewali	26,3	47.729	1.817
13	Binuang	123,3	26.801	217
14	Anreapia	124,6	9.038	173
15	Matangnga	234,9	4.859	21
	Jumlah	2.022,3	367.761,0	182

Sumber : Penduduk Polman akhir tahun 2007

Jumlah penduduk di Kabupaten Polman berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sebesar 178.982 jiwa (49,13%), kurang dari jumlah penduduk perempuan yang berjumlah 188.779 (51,3%). Dengan jumlah penduduk sebesar 367.761 jiwa, terdapat 78.982 rumah tangga yang mendiami Kabupaten Polman. Sehingga secara rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Polman adalah 4.7 orang/rumah tangga. Berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, jumlah penduduk laki-laki terdapat di Kecamatan Campalagian sebesar 24.193 jiwa atau mencapai 48,0 % serta jumlah penduduk perempuan mencapai 26.218 jiwa atau 52,0 % dari jumlah penduduk kecamatan tersebut. Kondisi sebaliknya terjadi di Kecamatan Matangnga, dimana jumlah penduduk paling sedikit dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten Polman. Dimana jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan

Matangnga adalah 2.470 jiwa atau setara dengan 50,8 %, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.389 jiwa atau 49,2% jumlah penduduk kecamatan tersebut.

Berdasarkan jumlah rumah tangga yang terdapat di setiap kecamatan, Kecamatan Campalagian merupakan kecamatan yang memiliki jumlah anggota rumah tangga terbanyak mencapai 10.786 rumah tangga, sedangkan Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang paling rendah hanya mencapai 1.004 rumah tangga. Uraian tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah rumah tangga dan anggota disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Rumah Tangga dan Anggota Rumah

No	Kecamatan	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah	Rumah Tangga	Anggota RT
1	Tinambung	9.803	11.030	20.833	4.374	4,8
2	Balanipa	11.601	12.414	24.015	4.890	4,9
3	Limboro	8.129	9.431	17.560	4.064	4,3
4	Tubbi taramanu	7.825	8.159	15.984	3.368	4,7
5	Allu	5.956	6.412	12.368	2.771	4,5
6	Campalagian	24.193	26.218	50.411	10.786	4,7
7	Luyo	11.940	12.346	24.286	5.150	4,7
8	Wonomulyo	20.458	21.397	41.855	9.762	4,3
9	Mapilli	15.554	16.308	31.862	6.990	4,6
10	Tapango	10.281	10.120	20.401	4.570	4,5
11	Matakali	9.751	10.008	19.759	4.235	4,7
12	Polewali	23.369	24.360	47.729	9.527	5,0
13	Binuang	13.077	13.724	26.801	5.646	4,7
14	Anreapia	4.575	4.463	9.038	1.805	5,0
15	Matangnga	2.470	2.389	4.859	1.044	4,7
	Jumlah	178.982	188.779	367.761	78.982	4,7

Sumber : Kabupaten Polman Dalam Angka, 2007

2. Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan lapangan pekerjaan, jumlah penduduk yang bekerja di bidang pertanian masih merupakan lapangan pekerjaan yang dominan diusahakan oleh penduduk. Terdapat 69,8 % penduduk yang bekerja di bidang pertanian, diikuti

oleh bidang perdagangan yang mencapai 10,6 %. Bidang pekerjaan yang cukup menonjol lainnya adalah bidang industri olahan dan jasa kemasyarakatan masing-masing mencapai 8,7 % dan 7,0 %. Sedangkan bidang pertambangan dan galian menyerap 1,1% tenaga kerja, selebihnya bidang keuangan dan asuransi, bidang listrik dan gas, serta bidang usaha lainnya masing-masing menyerap 0,1 % lapangan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya persentase tenaga kerja di masing-masing sektor dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Lapangan Pekerjaan 10 tahun ke Atas yang Bekerja di Polman tahun 2006

No	Lapangan Usaha	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah	Persen
1	Pertanian	77.913	27.575	105.488	69,8%
2	Pertambangan	1.673	-	1.673	1,1%
3	Industri Olahan	2.992	10.140	13.132	8,7%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	131	-	131	0,1%
5	Perdagangan	5.424	10.661	16.085	10,6%
6	Angkutan / Komunikasi	3.364	262	3.626	2,4%
7	Keuangan dan Asuransi	128	-	128	0,1%
8	Jasa Kemasyarakatan	6.639	4.004	10.643	7,0%
9	Lainnya	128	-	128	0,1%
Total		98.392	52.642	151.034	100,0%

Sumber : Kabupaten Polman dalam Angka, 2007

3. Pendidikan

Kondisi pendidikan di suatu daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah murid dan guru, untuk mengetahui rasio murid dan guru. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu dasar untuk memperbaiki kondisi yang ada. Rasio jumlah murid dan guru di Kabupaten Polman pada tingkat pendidikan SD di Kabupaten Polman adalah 1:21, pada tingkat SLTP 1:10 dan tingkat SLTA 1:12.

Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan wilayah kecamatan yang memiliki rasio jumlah murid dan guru tertinggi (1:37) untuk tingkat pendidikan SD, sedangkan Kecamatan Binuang merupakan kecamatan yang memiliki rasio jumlah guru dan murid tertinggi untuk tingkat SLTP mencapai 1:60, sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA rasio jumlah murid dan guru tertinggi terdapat pada kecamatan Balanipa mencapai 1:16. Adapun ratio murid dan guru terendah adalah Kecamatan Allu 1:7.

Namun demikian penyebaran jumlah sarana pendidikan pada tingkat SLTA belum mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan, masih ada enam kecamatan yang belum memiliki SMU diantaranya Limboro, Luyo, Mapilli, Anreapia dan matangnga. Kondisi ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Polman. Gambaran tentang rasio jumlah murid dan guru pada tingkat pendidikan SD, SLTP, dan SMU di Kabupaten Polman disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah Murid, Jumlah Guru dan Rasio Murid dan Guru pada Tingkat Pendidikan SD, SLTP, dan SMU di Kabupaten Polman

No	Kecamatan	SD			SLTP			SMU		
		Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio	Murid	Guru	Rasio
1	Tinambung	2.504	194	13	333	41	8	189	17	11
2	Balanipa	3.131	150	21	235	23	10	671	41	16
3	Limboro	2.128	149	14	149	27	6	-	-	-
4	Tubbi taramanu	2.915	79	37	97	24	4	99	12	8
5	Allu	1.778	110	16	50	17	3	158	22	7
6	Campalagia	7.125	376	19	803	125	6	1.212	121	10
7	Luyo	3.631	117	31	130	37	4	-	-	-
8	Wonomulyo	5.486	263	21	396	168	2	1.960	157	12
9	Mapilli	4.241	175	24	739	29	25	-	-	-
10	Tapango	2.820	88	32	278	30	9	120	14	9
11	Matakali	2.453	114	22	459	20	23	-	-	-
12	Polewali	6.392	340	19	839	204	4	3.767	290	13
13	Binuang	3.140	155	20	1.570	26	60	362	40	9
14	Anreapia	1.493	85	18	55	15	4	-	-	-
15	Matangnga	664	28	24	132	8	17	-	-	-
	Total	49.901	2.423	21	6.265	794	8	8.538	714	12

Sumber : Kabupaten Polman Dalam Angka, 2007.

4. Aksesibilitas dan Transportasi

Transportasi merupakan salah satu penunjang utama untuk memperlancar kegiatan perekonomian, khususnya aliran manusia dan barang. Usaha pembangunan yang semakin menuntut adanya transportasi yang menunjang mobilitas dari suatu tempat ketempat yang lain. Panjang jalan di Kabupaten Polman mencapai 1.370 km yang terdiri dari 435,6 km jalan aspal, 104,8 km jalan kerikil, dan jalan tanah (pergeseran). Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polman sebanyak 2.128 unit, yang terdiri dari 478 unit mobil bus, 976 unit mobil barang, dan 674 unit mobil penumpang dan kendaraan roda dua yang mencapai 18.262 unit. Air minum merupakan kebutuhan vital manusia. Ketersediaan fasilitas air minum yang sehat dan layak konsumsi merupakan kebutuhan yang harus tersedia. Saat ini di Kabupaten Polman terdapat penyediaan fasilitas air minum oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), dengan jumlah pelanggan 6.277 dengan total pendapatan sebesar 2,5 miliar per tahun.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Penyuluh kehutanan adalah petugas atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan atau secara penuh di wilayah kerjanya, oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain penyuluh adalah orang yang menjembatani sampainya teknologi atau inovasi ketangan petani atau kelompok tani sebagai pelaku utama dalam kegiatan penyuluhan.

1. Umur

Umur adalah salah satu karakteristik internal yang ikut mempengaruhi kemampuan fisik untuk bekerja dan kematangan penyuluh dalam berfikir serta bertindak. Penyuluh yang berusia lebih muda memiliki kekuatan fisik yang besar untuk melaksanakan tugasnya namun kadang kala mempunyai cara berpikir dan bertindak yang tidak disertai dengan perhitungan yang matang, sedangkan penyuluh yang lebih tua kemampuan dari segi fisik agak berkurang tetapi memiliki kestabilan emosi, pola berpikir dan bertindak yang didasarkan atas pertimbangan dan perhitungan rasional sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih efektif dan efisien. Pengelompokan umur dapat dibagi menjadi tiga golongan usia, yaitu : usia produktif (15-49 tahun), Usia kurang produktif (50-65 tahun), usia tidak produktif (>65 tahun). Kisaran usia responden dalam penelitian ini antara 42 sampai 57 tahun. Untuk lebih jelasnya mengetahui informasi tentang karakteristik responden berdasarkan usia atau umur dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Klasifikasi Usia atau Umur responden

No	Usia/Tahun	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	15-49 tahun	Produktif	12	60 %
2	50-65 tahun	Kurang Produktif	8	40 %
3	>65 tahun	Tidak Produktif	0	0 %
Jumlah			20	100 %

Hasil penelitian yang di uraikan pada Tabel 10 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (60%) berada pada kategori usia produktif, selebihnya pada kategori usia kurang produktif (40%). Hal ini memperlihatkan bahwa penyuluh kehutanan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memiliki aset sumberdaya manusia yang potensial untuk dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan penyuluhan guna peningkatan kinerja penyuluh dalam pelaksanaan tugas pokoknya.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden. Penyuluh yang mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi mempunyai tingkat pengetahuan, kecerdasan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu penyuluh yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat, mampu berpikir kritis dan praktis dalam arti cepat mengantisipasi setiap masalah yang ditemuinya. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir seseorang terutama dalam menganalisa suatu masalah.

a. Pendidikan formal

Pendidikan formal adalah tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang penyuluh. Hasil dari penelitian, tingkat pendidikan formal responden dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu: tingkat pendidikan sedang (tamat SLTA/SPMA), dan tingkat pendidikan tinggi (sarjana). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 dibawah ini.

Tabel 11. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	TIDAK SEKOLAH	Rendah	0	0 %
2	SLTA/SPMA	Sedang	16	80%
3	S1	Tinggi	4	20%
Jumlah			20	100%

Tabel 11 menunjukkan bahwa sebanyak 80% penyuluh mempunyai pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau tepatnya lulusan SPMA berada pada kategori sedang, memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang tugas pokoknya karena bidang yang ditempuh merupakan bidang kejuruan yang sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Sekolah Pertanian Menengah Atas dan 20% penyuluh memiliki pendidikan terakhir sarjana dengan gelar Sarjana Pertanian yang termasuk kategori tinggi.

b. Pendidikan non-formal

Pendidikan non-formal adalah kursus/pelatihan yang pernah diikuti seorang penyuluh. Dari hasil penelitian tingkat pendidikan non-formal responden dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu: rendah (tidak pernah kursus/pelatihan), sedang (pernah 1-2 kali), dan tinggi (sering >2 kali). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12 dibawah ini.

Tabel 12. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non-Formal

No	Kategori	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Rendah (tidak pernah kursus/pelatihan)	10	50
2	Sedang (1-2 kali mengikuti kursus/pelatihan)	2	10
3	Tinggi (>2 kali mengikuti kursus pelatihan)	8	40
Jumlah		20	100

Tabel 12 menunjukkan bahwa pendidikan non-formal sebagian besar responden 50 % berada dalam kategori rendah, 10 % berada dalam kategori sedang, dan 40 % berada dalam kategori tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa pada umumnya responden tidak mengikuti kursus/pelatihan yang berkaitan dengan penyuluhan dalam lima tahun terakhir. Dari hasil wawancara, mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk mengikuti kursus kursus atau pelatihan tetapi kesempatan kurang dan disebabkan juga tempat kursus atau pelatihan pada daerah tersebut belum tersedia.

3. Klasifikasi Penyuluh

Pembagian penyuluh kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman terdiri atas penyuluh kehutanan penyelia dan penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.



Tabel 13. Klasifikasi Penyuluh Kehutanan Menurut Jenjang Jabatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman.

No	Jenjang Jabatan Penyuluh	Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1	Penyuluh Kehutanan Madya	-	-	0
2	Penyuluh Kehutanan Muda	-	-	0
3	Penyuluh Kehutanan Penyelia	III c/III d	5	25
4	Penyuluh Kehutanan Pelaksana Lanjutan	III a/III b	15	75
5	Penyuluh Kehutanan Pertama	-	-	0
6	Penyuluh Kehutanan Pelaksana	-	-	0
	Jumlah		20	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenjang jabatan penyuluh pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman terdiri dari penyuluh kehutanan penyelia dengan golongan III d/III c sebanyak 5 orang atau 25 %, dan penyuluh kehutanan pelaksana lanjutan dengan golongan III a/III b sebanyak 15 orang atau 75 %.

4. Pengalaman Kerja

Pengalaman kerja adalah lamanya seorang penyuluh bertugas sebagai penyuluh kehutanan sampai penelitian ini dilaksanakan. Penyuluh yang pengalaman kerja yang lama sudah lebih menguasai dan menghayati pekerjaannya, lebih mampu mengambil keputusan berkaitan dengan tugasnya sehingga penyuluh tersebut mampu memahami kebutuhan teknologi dan inovasi bagi masyarakat atau petani sarannya. Sedangkan penyuluh yang baru bertugas masih perlu belajar melakukan sosialisasi dan mampu menjalin hubungan baik dengan masyarakat tani untuk bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat petani.

Pengalaman kerja dalam penelitian ini adalah adalah masa kerja responden mulai bekerja sebagai penyuluh. Dari hasil pengolahan data pengalaman kerja responden dibagi dalam tiga kategori. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pengalaman Kerja sebagai Penyuluh

No	Kategori	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Pengalaman baru (< 20 tahun)	2	10
2	Pengalaman sedang (20-30 tahun)	17	85
3	Pengalaman lama (> 30 tahun)	1	5
Jumlah		20	100

Tabel 14 menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki pengalaman kerja dalam kategori sedang sebanyak 17 orang atau 85 %, sedangkan yang berpengalaman kerja baru sebanyak 10 % dan yang berpengalaman kerja lama sebanyak 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya pengalaman akan menentukan besarnya kemampuan belajar dimana orang yang memiliki pengalaman banyak lebih mampu melakukan proses interaksi dan inovasi terhadap hal-hal baru yang ditemukan dan mampu mengatasi masalah-masalah penyuluhan dengan pengembangan pengetahuan yang dimilikinya dilapangan.

5. Tingkat Kebutuhan Hidup

Tingkat kebutuhan hidup dalam penelitian ini adalah bentuk kebutuhan hidup yang dapat menimbulkan motivasi bekerja responden, seperti pangan, sandang, rumah, sarana dan prasarana penyuluhan, sistem pengkajian yang adil, kebijakan yang menunjang karier, pendidikan yang lebih baik, perlakuan yang adil dikantor, kerja sama, rasa setia kawan, disenangi dan diperhitungkan sebagai

pribadi dilingkungan kerja, perlindungan dari bahaya dan ancaman dari kondisi kerja, status kedudukan yang lebih tinggi dilingkungan kerja, dan penghargaan dari pihak lain. Dari hasil pengolahan data tingkat kebutuhan hidup responden dikelompokkan kedalam lima kategori. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Klasifikasi Tingkat Kebutuhan yang dirasakan Responden

No	Kategori	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak memuaskan (skor <25)	0	0
2	Tidak memuaskan (skor 26-37)	1	5
3	Kurang memuaskan (skor 38-49)	10	50
4	Memuaskan (skor 50-61)	9	45
5	Sangat Memuaskan (skor >62)	0	0
Jumlah		20	100

Tabel 15 menunjukkan bahwa jumlah responden yang tingkat kebutuhan hidupnya kurang memuaskan sebanyak 10 orang atau 50 %, sedangkan responden yang tingkat kebutuhan hidupnya memuaskan sebanyak 9 orang atau 45 % dan yang tidak memuaskan sebanyak 1 orang atau 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan yang dirasakan saat ini kurang memberikan dorongan motivasi bekerja pada responden padahal motivasi bekerja sangat penting, karena dengan adanya motivasi dapat mendorong memacu individu untuk bekerja keras dalam mencapai produktivitas yang tinggi.

6. Pengetahuan Tentang Tugas Pokok Penyuluh

Pengetahuan penyuluh terhadap tugas pokoknya dalam penelitian ini adalah sekumpulan informasi tentang tugas pokok penyuluh kehutanan yang dipahami oleh responden. Dari hasil pengolahan data tentang pengetahuan tingkat

pelaksanaan tugas pokok responden dikelompokkan dalam lima kategori yaitu sangat rendah (skor ≤ 84), rendah (skor 85 – 122), sedang (skor 123 – 160), tinggi (skor 161 – 198), sangat tinggi (skor ≥ 199). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Klasifikasi Tingkat Pengetahuan Responden Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh

No.	Kategori Tingkat Pengetahuan Responden dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Sangat rendah (skor ≤ 84),	0	0
2.	Rendah (skor 85 – 122)	0	0
3.	Sedang (skor 123 – 160)	5	25
4.	Tinggi (skor 161 – 198)	15	75
5.	Sangat tinggi (skor ≥ 199)	0	0
	Jumlah	20	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki pengetahuan dalam kategori sedang dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebanyak 5 orang atau 25 %, sedangkan yang memiliki pengetahuan dalam kategori tinggi sebanyak 15 orang atau 75%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyuluh kehutanan di Kabupaten Polman telah memahami tugas pokoknya sebagai penyuluh kehutanan, tetapi walaupun demikian para penyuluh berharap agar bisa lebih menambah pengetahuannya melalui pendidikan maupun kursus-kursus atau pelatihan yang berhubungan dengan bidang tugasnya untuk peningkatan sumberdaya dalam pelaksanaan tugas pokoknya sebagai penyuluh, dan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam melakukan penyuluhan pada tingkat masyarakat hutan pada kawasan wilayah kerja mereka.

7. Kinerja Penyuluh dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing kearah pencapaian tujuan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja penyuluh dalam pelaksanaan tugas pokoknya adalah hasil kerja yang dicapai responden dalam menjalankan tugas pokoknya. Untuk mengukur kinerja penyuluh dalam pelaksanaan tugas pokoknya dalam penelitian ini digunakan beberapa indikator tentang tugas pokok penyuluh kehutanan.

Tabel 17. Klasifikasi Tingkat Kinerja Penyuluh Kehutanan dalam Pelaksanaan Tugas Pokok di Kabupaten Polman

No	Kategori Tingkat Kinerja Penyuluh dalam Pelaksanaan Tugas Pokoknya	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Sangat Rendah (Skor ≤ 84)	0	0
2	Rendah (skor 85 – 122)	6	30
3	Sedang (Skor 123 – 160)	5	25
4	Tinggi (Skor 161 – 198)	2	10
5	Sangat Tinggi (Skor ≥ 199)	7	35
Jumlah		20	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa 35 % penyuluh atau sebanyak 7 orang tingkat kinerja dalam pelaksanaan tugas pokoknya termasuk dalam kategori tinggi, 30 % penyuluh termasuk dalam kategori rendah, 25 % dalam kategori sedang dan 10 % dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penyuluh kehutanan yang kurang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya.

Meskipun pengetahuan tingkat pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penyuluh sudah tergolong tinggi tetapi dalam melaksanakan tugas penyuluh kehutanan masih menemui berbagai jenis hambatan dan masalah. Masalah-masalah yang sering dihadapi oleh penyuluh dalam melaksanakan tugasnya antara lain : kurangnya biaya operasional, media, fasilitas penyuluhan yang digunakan masih kurang tersedia, dan kurangnya minat petani mengikuti kegiatan penyuluhan.

B. Perencanaan Program Penyuluhan Kehutanan

1. Program Penyuluhan

Program penyuluhan kehutanan wiliayah kerja I (Polewali, Anreapi, Binaung) tertuang dalam program penyuluhan kehutanan yang sifatnya jangka pendek untuk satu tahun. Penyusunan program dibuat sebagai pedoman kerja tahunan dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang merupakan salah satu wujud perencanaan dengan memadukan aspirasi masyarakat dengan potensi wilayah dan program kehutanan yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif.

Penyusunan program selain dilakukan secara aspiratif dengan mencari dan mendengarkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari petani melalui pertemuan dan kunjungan ke lapangan juga dilakukan secara partisipatif yakni dalam penyusunan program, penyuluh turut melibatkan petani ikut berpartisipasi dengan meminta masukan dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan rencana ke depannya.

Adapun isi dari program penyuluhan kehutanan mencakup :

a. Keadaan

Keadaan adalah data, fakta dan keterangan-keterangan yang telah diperoleh, dihimpun atau dikumpulkan pada saat akan disusunnya suatu program. Data yang ada di Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang, Anreapi) cukup lengkap dimana di dalamnya ditampilkan :

- 1) Keadaan Sumber Daya Alam, meliputi :
 - a) Letak geografis dan luas wilayah
 - b) Karakteristik tanah dan iklim
 - c) Luas tanah
- 2) Keadaan Sumber Daya Manusia, meliputi :
 - a) Jumlah penduduk
 - b) Pekerjaan
 - c) Pendidikan
 - d) Karakteristik Kelompok tani
- 3) Keadaan Kelembagaan, meliputi :
 - a) Lembaga penyuluhan
 - b) Kelembagaan petani
 - c) Kelembagaan sosial ekonomi

Data-data tersebut di atas dikumpulkan dengan cara menghubungi beberapa pihak seperti : lembaga/aparat pemerintah dan tokoh masyarakat, dengan teknik pengumpulan data antara lain wawancara, pengamatan dan pencatatan data sekunder.

b. Identifikasi Masalah

Masalah adalah sesuatu yang tak diinginkan atau segala sesuatu (faktor penyebab) yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Adapun hasil kajian permasalahan yang ada di Wilayah Kerja I dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Kajian Permasalahan Kegiatan Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang, Anreapi)

No	Kegiatan	Masalah	
		Perilaku	Non perilaku
1	Pembuatan kebun rakyat	Petani belum tahu secara teknik pembuatan kebun rakyat	Biaya dan tenaga kurang
2	Pembuatan terasering	Petani belum mengerti pembuatan terasering dan manfaatnya	Sebagian petani belum membuat terasering karena membutuhkan tenaga
3	Pengendalian kebakaran hutan	Petani belum tahu dampak negatif dari kebakaran hutan	Pembinaan belum berjalan sesuai yang diharapkan
4	Pembuatan persemaian	Petani belum tahu teknik pembuatan persemaian	Biaya dan tenaga kurang

c. Penetapan tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang pemecahan masalah atau pernyataan tentang apa yang diinginkan sehubungan dengan masalah yang dihadapi. Penetapan tujuan di wilayah kerja I disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Tujuan Penyuluhan di Wilayah Kerja I, (Polewali, Bninuang Anreapi)

No	Kegiatan	Tujuan Penyuluhan	Lokasi
1	Pembuatan kebun rakyat	Agar tingkat penerapan teknologi petani pada kegiatan pembuatan kebun rakyat dapat ditingkatkan	Paku, Mirring, Amassanga, Batetangnga
2	Pembuatan terasering	Agar petani dapat membuat terasering secara teknik pada lahan usaha taninya yang disesuaikan dengan kemiringan lereng	Kuajang, Tonyamang, Duampanua, Pappandangan
3	Pengendalian kebakaran hutan	Untuk menimalisir kebakaran hutan setiap tahunnya, maka kemauan dan kesadaran dari masyarakat agar tidak membakar rumput pada kebun sangat diharapkan	Kelapadua, Anreapi, Kunyi, Pasiang
4	Pembuatan persemaian	Agar petani dapat mengetahui secara teknik didalam pembuatan persemaian	Pesunan, Rondongan, Galung, Pommosi

d. Perumusan cara mencapai tujuan

Cara mencapai tujuan di dalam program penyuluhan biasanya dirumuskan dalam suatu bentuk rencana kerja kegiatan penyuluhan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Cara Mencapai Tujuan Penyuluhan di Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang, Anreapi)

No	Tujuan Penyuluhan	Kegiatan Penyuluhan	Lokasi	Pendekatan Penyuluhan	Metode Penyuluhan
1	Agar tingkat penerapan teknologi petani pada kegiatan pembuatan kebun rakyat dapat ditingkatkan	a. Pertemuan b. Lokasi kelompok	Paku, Mirring, Amassanga, Batetangnga	Kelompok Perorangan	Kunjungan Demonstrasi
2	Agar petani dapat membuat terasering secara teknik pada lahan usaha taninya yang disesuaikan dengan kemiringan lereng	a. Pertemuan b. Lokasi kelompok	Kuajang, Tonyamang, Duampanua, Pappandangan	Kelompok Perorangan	Kunjungan Demonstrasi
3	Untuk menimalisir kebakaran hutan setiap tahunnya, maka kemauan dan kesadaran dari masyarakat agar tidak membakar rumput pada kebun sangat diharapkan	a. Pertemuan b. Lokasi kelompok	Kelapadua, Anreapi, Kunyi, Pasiang	Kelompok Perorangan	Kunjungan Demonstrasi
4	Agar petani dapat mengetahui secara teknik didalam pembuatan persemaian	a. Pertemuan b. Lokasi kelompok	Pesunan, Rondongan, Galung, Pommosi	Kelompok Perorangan	Kunjungan Demonstrasi

2. Rencana Kerja Penyuluhan

Rencana kerja Penyuluh Kehutanan merupakan kurikulum atau pedoman dalam proses penyuluhan Kehutanan di tingkat lapangan yang disusun setiap tahun. Rencana Kerja dibuat pada saat program penyuluhan telah disusun dan ditetapkan. Penyuluh kehutanan di tingkat kelurahan diwajibkan membuat rencana kerja untuk wilayah kerjanya masing-masing yang berlaku untuk satu tahun,

dimana rencana tersebut disusun secara partisipatif oleh berbagai unsur desa seperti kepala desa, penyuluh, petani, ketua kelompok tani. Dalam rencana kerja yang dibuat oleh para penyuluh haruslah mencakup informasi yang melatarbelakangi penyusunan program penyuluhan kehutanan antara lain menyangkut keadaan-keadaan yang ada di daerah tersebut serta masalah-masalah dan keinginan masyarakat. Wilayah yang mewakili kegiatan penyuluhan kehutanan di kabupaten polewali Mandar (Polman) yaitu Kecamatan Polewali, Anreapi dan Binuang.

C. Pelaksanaan Program Penyuluhan Kehutanan

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam rencana kerja penyuluhan dimana didalamnya akan dibahas perihal kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan antara lain :

1. Metode Penyuluhan

Jenis metode penyuluhan yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar adalah demonstrasi cara, pertemuan kelompok tani, kunjungan kelompok, dan anjang sana atau kunjungan rumah. Metode yang paling dominan dilakukan adalah kegiatan kunjungan. Kunjungan penyuluh kepada kelompok tani atau petani, dapat dilakukan di rumah atau di lahan usaha tani. Pemilihan lokasi kunjungan akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan di lahan usaha tani karena lebih mudah untuk menerapkan metode penyuluhan seperti pembuatan

persemaian, sehingga waktu yang tersedia bagi petani lebih banyak di lahan usaha tani sehingga petani lebih mudah dikumpulkan karena kegiatan pada siang hari lebih banyak dilakukan di lokasi usaha tani daripada dirumah.

Frekuensi kunjungan penyuluh ke kelompok tani/petani ideal dilakukan 4 kali dalam sebulan jadi frekuensi ideal kunjungan dalam setahun sebanyak 48 kali. Frekuensi kunjungan penyuluh kehutanan di wilayah kerja I dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 21. Frekuensi Kunjungan Penyuluh Kehutanan di Wilayah Kerja I (Polewali, Binuang, Anreapi).

No	Kecamatan	Realisasi	Rencana
1	Polewali	100	48 kali
2	Binuang	80	48 kali
3	Anreapi	26	48 kali

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki frekuensi kunjungan yang paling tinggi adalah Kecamatan Polewali yaitu sebanyak 100 kali, ini berarti bahwa kunjungan penyuluh ke kelompok tani/petani sering dilakukan. Sedangkan di Kecamatan Binuang frekuensi kunjungan penyuluh sebanyak 80, frekuensi kunjungan yang paling rendah dimiliki oleh Kecamatan Anreapi yaitu sebanyak 26 kali yang menandakan bahwa kunjungan yang dilakukan penyuluh dua kali dalam sebulan atau dapat dikatakan bahwa penyuluh sangat jarang melakukan kunjungan.

2. Sasaran dan Materi Penyuluhan

Sasaran penyuluhan kehutanan yaitu seluruh petani/kelompok tani yang berada di Kecamatan Polewali, Kecamatan Anreapi, Kecamatan Binuang yang berjumlah 80 kelompok terdiri atas : kelompok tani pemula sebanyak 50 kelompok, kelompok tani lanjut sebanyak 20 kelompok, dan kelompok tani madya sebanyak 10 kelompok.

Isi materi penyuluhan kehutanan yang ada di wilayah kerja I antara lain :

1. Pemeliharaan Hutan Rakyat
2. Pemeliharaan kebun Rakyat
3. Pembuatan teras bangku
4. Pembuatan konservasi tanah
5. Pemupukan
6. Pembinaan kelompok tani

3. Peralatan Penyuluhan

Peralatan penyuluhan adalah alat bantu yang sangat diperlukan dalam kegiatan penyuluhan agar materi dapat sampai kepada sasaran dengan baik. Peralatan yang digunakan oleh penyuluh kehutanan di wilayah kerja I adalah alat tulis menulis dan alat lainnya. Dalam kegiatan penyuluhan, penyuluh lebih sering mengadakan diskusi karena paling mudah dilakukan serta tidak membutuhkan banyak biaya dan peralatan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan penilaian program di wilayah kerja I (Polewali, Anreapi, Binuang) dilakukan secara bersama-sama dalam bentuk diskusi di antara penyuluh. Masing- masing penyuluh dapat memberikan aspek – aspek program yang akan atau yang sedang dibicarakan serta membahas tingkat keaktifan penyuluh dalam menjalankan tugasnya dan kendala- kendala yang dihadapi oleh penyuluh dilapangan. Melalui kegiatan ini diharapkan apa yang telah dilaksanakan dalam kegiatan penyuluhan ditingkatkan sehingga akan lebih baik lagi serta terencana dan terarah kedepannya.

E. Kendala Penyuluhan

1. Dana

Dana merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan Kehutanan. Semua kegiatan penyuluhan seharusnya ditunjang dengan dana yang relatif cukup memadai, sedang besar kecilnya dana tergantung pada bentuk penyuluhannya.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, dana penyelenggaraan penyuluhan disediakan oleh pemerintah 100 %. Tapi masalahnya adalah akibat dari berlakunya otonomi daerah yang telah melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dana penyuluhan yang disediakan sangat sedikit sehingga tidak mencukupi untuk suatu kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan.

2. Wilayah Kerja Penyuluhan

Wilayah kerja penyuluh Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman yakni membawahi 15 wilayah kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa sebanyak 132 buah dengan jumlah Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kehutanan (WKBPK) sebanyak 6 (enam) seperti yang tertera pada Tabel 22 di bawah :

Tabel 22. Pembagian Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kehutanan di Kabupaten Polman

No	Wilayah Kerja	Kecamatan
1	I (Satu)	Polewali, Binuang, Anreapi
2	II (Dua)	Mapilli, Tapango, Matakali
3	III (Tiga)	Wonomulyo, Bulu
4	IV (Empat)	Campalagian, Luyo
5	V (Lima)	Tinambung, Limboro, Balanipa
6	VI (Enam)	Matangnga, Allu

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa cakupan tiap Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan (WKBPK) meliputi 15 wilayah kecamatan, kondisi tersebut cukup mempersulit pelayanan penyuluh mengingat jumlah penyuluh yang hanya 20 orang dan jika dikaitkan dengan jumlah sebaran kecamatan yang ada di Polman sebanyak 15 Kecamatan maka perbandingannya kurang proposional, karena rata-rata satu (1) wilayah kerja di tempatkan 3-5 orang penyuluh dengan jumlah desa 6-9 dan jumlah 178 kelompok tani, jadi jika 15 kecamatan maka seharusnya penyuluh ada 48 - 80 orang. Selain itu cakupan wilayah kerja 2 sampai 3 kecamatan juga mempersulit pelayanan

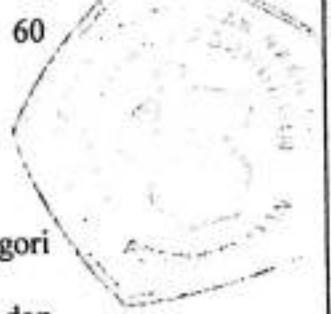
kegiatan penyuluh. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Polman dalam hal berkoordinasi dengan para aparat pemerintahan terutama aparat kecamatan dan kelompok tani itu sendiri karena keterbatasan penyuluh dengan kondisi topografi tiap daerah yang berbeda-beda.

3. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan pemenuhan kebutuhan akan kebutuhan penunjang kegiatan penyuluhan serta kesesuaian antara jumlah yang tersedia dengan kebutuhan penyuluh. Dari hasil pengolahan data tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dibagi kedalam 5 kategori. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Klasifikasi Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

No	Kategori Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat tidak sesuai (skor ≤ 27)	2	10
2	Tidak Sesuai (Skor 28-40)	8	40
3	Kurang Sesuai (Skor 41-53)	10	50
4	Sesuai (Skor 54-66)	0	0
5	Sangat Sesuai (≥ 67)	0	0
Jumlah		20	100



Tabel 23 menunjukkan bahwa responden yang memiliki skor kategori tidak sesuai, sangat tidak sesuai dan tidak sesuai sebanyak 10 orang (50 %), dan kategori kurang sesuai sebanyak 10 orang (50 %). Hal ini menandakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat di bawah harapan para penyuluh, sehingga pada pelaksanaan tugas di lapangan penyuluh banyak mengalami hambatan, dalam menjangkau beberapa wilayah kerja penyuluhan. Sarana yang tersedia hanya dua buah kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara di peroleh bahwa penyuluh sangat menyesalkan ketidaktersediaan sarana, ditambah lagi ada kecenderungan sarana yang semakin dikurangi keberadaannya seperti tidak ada lagi biaya perjalanan, padahal ada beberapa wilayah kerja penyuluh berada di daerah bergunung, terpencil, jalanan yang sempit dan rusak berat serta medan yang sangat terjal sehingga hanya mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut :

1. Kinerja penyuluh kehutanan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman belum sepenuhnya optimal.
2. Dalam penyusunan program, penyuluh turut melibatkan petani ikut berpartisipasi dengan meminta masukan dan informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan rencana kedepannya.
3. Kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polman, yaitu : dana, wilayah kerja penyuluh serta sarana dan prasarana.

B. Saran

1. Sebaiknya tingkat pendidikan dari penyuluh kehutanan yang setingkat SMA ditingkatkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Perlunya penambahan tenaga penyuluh untuk menyeimbangkan dengan wilayah kerja penyuluh
3. Perlunya peninjauan kembali luasan wilayah kerja penyuluh kehutanan supaya profesional
4. Upaya penyediaan kendaraan dinas guna memperlancar kegiatan penyuluhan.
5. Mengupayakan sumber-sumber dana dari instansi/lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananto, Yudono dan Rahmat., 1999. *Perencanaan Peningkatan Kinerja*. Bahan Kuliah Pasca Sarjana. LAN-UNHAS, Ujung Pandang.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2000. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan*. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 2003. *Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan*. Pusat Penyuluhan Kehutanan. Jakarta
- Dharma, A. 1991. *Manajemen Prestasi Kerja*. Rajawali Press, Jakarta.
- Gubri, 2005. *Penyuluh Hutan Harus Diperhatikan*. Riau Online www.Riau.go.id/index.php. (Diakses tanggal 20 September 2007).
- Hasibuan., Melayu, SP. 1994. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV. Mas Agung, Jakarta.
- Ridwan., 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Alfabeta*. CV. Sinar Baru, Bandung.
- Siagian, Sondang. P. 1983. *Evaluasi sebagai Fungsi Manajemen*. Haji Masagung, Jakarta.
- Soeroso, 1999. *Perencanaan Penyuluhan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Totok, Mardikanto. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Udin, Syamsuddin. 1987. *Dasar-dasar Penyuluhan dan Modernisasi Pertanian*. Bina Cipta Bandung.
- Van Den Ban, A. W and H. S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian (terjemahan)*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Yaman Mulyana, 1999. *Materi Penyuluhan Kehutanan II*. Pusat Penyuluhan Kehutanan dan Perkebunan, Dephut, Jakarta.